

BAB I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dunia yang kita hidupi saat ini sedang tidak baik-baik saja. Berbagai permasalahan lingkungan skala global sedang kita rasakan bersama: perubahan iklim, polusi, deforestasi, dan pelbagai krisis ekologi lainnya. Pengaruh manusia telah menghangatkan iklim pada tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya setidaknya dalam 2000 tahun terakhir (IPCC Website, 2025). Perubahan iklim telah menciptakan suhu panas ekstrem yang lebih sering dan lebih intens, curah hujan lebat yang lebih sering dan lebih intens, peningkatan bencana kekeringan dan kebakaran di berbagai wilayah, serta berbagai dampak mengerikan lainnya (IPCC Website, 2025).

Permasalahan-permasalahan yang dijabarkan di atas tentunya tak dapat dipandang sebelah mata. Alasannya, tak lain dan tak bukan karena perubahan iklim merupakan suatu fenomena global. Dampaknya melampaui sekat-sekat negara. Tak ada satupun negara di bumi ini yang tak merasakan dampak perubahan iklim dan pemanasan global. Tentu, banyak pihak yang telah dan sedang bergerak menyikapi problem ini. Mulai dari pemerintah, NGO, Universitas, hingga institusi agama.

Gereja Katolik sebagai salah satu institusi agama terbesar dan tertua di dunia, dengan pengaruh yang melampaui ranah spiritual, pun turut serta mengambil peran dalam mengadvokasikan permasalahan lingkungan global. Sebagai institusi global, Gereja Katolik telah dan sedang mengambil peran dalam mempromosikan etika dan norma sosial di berbagai belahan dunia. Gereja tidak hanya berkonsentrasi pada ajaran iman, moral, dan kehidupan rohani, tetapi juga memiliki komitmen yang kuat terhadap masalah sosial seperti keadilan, hak asasi manusia, dan lingkungan.

Dalam kapasitasnya sebagai Norm Entrepreneur, Gereja Katolik telah berperan aktif dalam menciptakan dan mendorong standar baru mengenai pelestarian lingkungan dan tanggung jawab manusia terhadap Bumi. Ini terlihat jelas dalam ajaran dan inisiatif Gereja yang menekankan perlindungan lingkungan sebagai bagian dari keadilan sosial dan tanggung jawab moral manusia.

Dalam konteks ilmu hubungan internasional, norma didefinisikan sebagai gagasan dari berbagai tingkat abstraksi dan spesifikasi yang menyangkut nilai-nilai fundamental, prinsip-prinsip pengorganisasian atau prosedur standar. Kebijakan, undang-undang, dan

berbagai perjanjian resmi menunjukkan standar yang berlaku di seluruh negara dan di seluruh dunia.

Salah satu upaya nyata yang digalakkan Gereja Katolik, dalam perannya sebagai agen yang aktif dalam menginisiasi dan mempromosikan norma-norma baru terkait pelestarian lingkungan dan tanggung jawab umat terhadap bumi ialah ketika Paus Fransiskus selaku pemimpin tertinggi gereja katolik sedunia mengeluarkan dengan mengeluarkan Ensiklik *Laudato Si* pada tahun 2015.

Panggilan dari Ensiklik Paus Fransiskus *Laudato Si* adalah untuk membantu orang di seluruh dunia memahami kehancuran yang dilakukan manusia terhadap lingkungan dan sesama manusia. Dokumen ini lebih luas dalam banyak hal karena tidak hanya melihat dampak perilaku manusia terhadap lingkungan, tetapi juga melihat banyak penyebab budaya, filosofis, dan teologis yang mengancam hubungan manusia dengan alam dan satu sama lain dalam berbagai situasi. Dokumen ini jelas merupakan tanggapan nyata gereja katolik terhadap masalah krisis lingkungan.

Dokumen *laudato si* ini terdiri atas beberapa tema utama antara lain ekologi integral, tanggung jawab sosial manusia terhadap lingkungan, serta hubungan manusia dengan alam raya. Singkatnya, dokumen ini merupakan imbauan kepada seluruh umat manusia untuk kembali memikirkan permasalahan lingkungan global ini.

Gereja katolik, sebagai norm entrepreneur, dapat memanfaatkan jaringan transnasional yang ia miliki dan sifatnya sebagai organisasi non-pemerintah (LSM) guna memaksimalkan Sumber daya ideasional dan material yang ia miliki untuk membawa perubahan-perubahan normatif secara luas dan nyata khususnya dalam hubungannya dengan krisis iklim yang telah dan sedang terjadi.

Dokumen *laudato si* merupakan ensiklik yang dikeluarkan oleh gereja katolik sebagai seruan dan imbauan bagi segenap umat katolik di seluruh dunia agar hidup seturut nilai-nilai yang terkandung di dalam dokumen tersebut khususnya seputar kepedulian terhadap krisis iklim dan bagaimana kita perlu menyikapinya. Di sinilah gereja katolik dapat memainkan perannya sebagai norm entrepreneur di tataran global.

Dalam konteks komunitas katolik di makassar, gereja katolik mempunyai peranan penting dalam mempromosikan berbagai norma salah satunya norma kepedulian dan pelestarian lingkungan yang dikemukakan dalam ensiklik *laudato si*. Meskipun merupakan

minoritas dalam jumlahnya, komunitas katolik di makassar senantiasa berpartisipasi dalam kehidupan sosial dan keagamaan, serta terlibat dalam berbagai inisiatif yang berfokus pada tanggung jawab sosial, termasuk mengenai problem krisis lingkungan.

Komunitas katolik di makassar sendiri berada di bawah naungan Keuskupan Agung Makassar tentunya memiliki peran yang signifikan dalam mempromosikan ajaran-ajaran gereja, termasuk yang bersangkutan dengan pelestarian lingkungan dan permasalahan krisis iklim. Lebih jauh, sebagai komunitas yang berada di kota metropolitan semacam makassar, komunitas katolik di makassar mempunyai anggota yang berasal dari berbagai latar belakang yang cukup beragam. Keterlibatan komunitas katolik di makassar terwujud melalui kehadiran berbagai paroki, pastor, komunitas umat, yayasan-yayasan katolik (sekolah, rumah sakit, dll).

Sebagai kota metropolitan, kota makassar tak luput dari permasalahan lingkungan. Pencemaran sampah dan pengelolaan limbah yang serampangan, pencemaran air dan udara, serta deforestasi yang masif adalah sekelumit permasalahan lingkungan yang secara gamblang dapat kita saksikan bersama di kota makassar. Ditambah lagi minimnya edukasi publik perihal kesadaran lingkungan serta gaya hidup masyarakat perkotaan yang acapkali mengabaikan semangat keberlanjutan. Masalah-masalah lingkungan di atas menemukan relevansinya dalam ajaran *laudato si* yang menekankan perlunya tanggung jawab dan kepedulian manusia dalam merawat bumi sebagai "rumah bersama".

Walaupun demikian, tentu ada berbagai tantangan dan hambatan yang dialami. Tentu ada berbagai kesenjangan yang tampak antara ajaran gereja katolik soal kesadaran lingkungan yang mewujud melalui ensiklik *laudato si* dan implementasi nyata dalam kehidupan sehari-hari umat katolik, khususnya umat katolik di makassar.

Skripsi ini bertujuan mengulik bagaimana penerapan ensiklik *laudato si* di komunitas katolik di makassar. Apakah gereja katolik sungguh berperan sebagai *norm entrepreneur* di wilayah ini? Apakah ada hambatan dan kendala yang dihadapi dalam penerapannya? Bagaimana bentuk penerapannya di komunitas katolik di makassar ini?

Lebih jauh, penelitian ini bertujuan melihat secara lebih jauh dan seksama peran gereja katolik sebagai agen perubahan dalam meningkatkan kesadaran lingkungan khususnya di tataran komunitas lokal.

Hasil penelitian ini kiranya akan menjadi sumbangsih bagi gereja katolik dan organisasi lainnya dalam melihat partisipasi umat dalam menjaga lingkungan. Bisa dilihat

nantinya apakah penerapan ensiklik laudato si ini sudah cukup maksimal atau tidak di tingkatan komunitas lokal khususnya di komunitas katolik di makassar. Apa saja kendala dan tantangan yang dihadapi.

B. Batasan dan Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang penelitian sebelumnya, maka penulis membatasi penelitian pada tahun 2015-2023. Pemilihan batasan tahun 2015-2023 dikarenakan rentang waktu tersebut ditandai dengan dikeluarkannya ensiklik laudato si' oleh yang mulia sri paus Fransiskus. Selain itu, penulis juga membatasi penelitian pada penerapannya di komunitas katolik di makassar karena ingin melihat bagaimana penerapannya pada skala lokal.

Agar mempermudah, berikut merupakan rumusan masalah yang telah dirumuskan peneliti:

1. Bagaimana peran Gereja Katolik dalam mempromosikan norma lingkungan yang diusung oleh Ensiklik Laudato Si di lingkup Keuskupan Agung Makassar?
2. Bagaimana tantangan yang dihadapi oleh Keuskupan Agung Makassar dalam mengimplementasikan norma-norma lingkungan dari Ensiklik Laudato Si di tingkat komunitas lokal khususnya di Kevikepan Makassar?

C. Tujuan dan Manfaat penelitian

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis sejauh mana peran Gereja Katolik dalam mempromosikan norma lingkungan yang diusung oleh Ensiklik Laudato Si di lingkup Keuskupan Agung Makassar
2. Untuk mengidentifikasi tantangan yang dihadapi oleh Keuskupan Agung Makassar dalam mengimplementasikan norma-norma lingkungan dari Ensiklik Laudato Si di tingkat komunitas lokal khususnya di Kevikepan Makassar

Adapun secara spesifik, manfaat dari penelitian yang penulis lakukan adalah sebagai berikut:

1. Penelitian ini dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap literatur akademis dalam bidang studi tentang peran Gereja Katolik melalui Ensiklik Laudato Si berkontribusi dalam pembentukan norma global terkait isu lingkungan hidup khususnya di komunitas katolik di makassar

2. Hasil penelitian dapat memberikan masukan berharga untuk perumusan kebijakan terkait dengan peran dan tantangan yang dihadapi oleh Gereja Katolik dalam mengimplementasikan norma-norma lingkungan dari Ensiklik Laudato Si di tingkat komunitas lokal

3. Penelitian dapat mengidentifikasi dampak dari penerapan ensiklik Laudato Si' khususnya terkait Sejauh mana Gereja Katolik melalui Ensiklik Laudato Si berkontribusi dalam pembentukan norma global terkait isu lingkungan hidup

D. Kerangka Konseptual

Dalam penelitian ini, penulis akan menganalisis bagaimana peran dan tantangan gereja katolik sebagai norm entrepreneur di tataran komunitas lokal yakni di komunitas katolik di makassar. Secara lebih spesifik perihal bagaimana gereja katolik melalui ensiklik laudato si' dapat menjadi aktor yang menyebarluaskan gagasan dan mempengaruhi masyarakat di tataran lokal. Ensiklik laudato si' dirilis tahun 2015 di bawah kepemimpinan sri paus fransiskus. Berdasarkan hal ini, penulis akan menggunakan beberapa konsep/teori utama untuk menjadi pisau analisis dalam penelitian ini. Penjelasan lebih lanjut mengenai konsep/teori yang akan digunakan adalah sebagai berikut:

1. Teori Konstruktivisme: Agen Struktur

Ada sebuah paradigma baru yang muncul dalam lingkungan studi HI khususnya pasca perang dingin. Paradigma, pendekatan, atau teori baru ini lantas dikenal umum melalui istilah konstruktivisme. Karen M. Fierke dan Knud E. Jorgensen dalam bukunya "constructing international relations: the next generation" menegaskan bahwa paradigma konstruktivisme merupakan gagasan yang merupakan bagian dari tradisi berpikir orang eropa mengenai hubungan internasional (Fierke & Jorgensen, 2001). Penekanan ini diberikan guna membedakan konstruktivisme dari teori-teori HI sebelumnya yang umumnya dicetuskan oleh para pemikir amerika yang acapkali mengedepankan empirisme, rasionalisme, materialisme, dan pragmatisme (Bakry, 2017).

Konstruktivisme lahir sebagai semacam antitesis dari ketiadaan analisis yang mampu disajikan oleh para pemikir neorealis dan neoliberalis dalam memprediksi berakhirnya fase perang dingin. Para penganut konstruktivisme mengembangkan perspektif sosiologis dan antropologis tentang politik dunia yang menekankan pentingnya norma, peran identitas dalam pembentukan kepentingan dan tindakan, serta hubungan timbal balik yang saling konstitutif antara agen dan struktur. Konstruktivisme lebih mengedepankan metode serta gagasan

interpretatif, diskursif, dan historical yang cenderung merepresentasikan sikap interpretivisme kritis.

Kaum konstruktivis meyakini bahwa struktur material memiliki signifikansi sosial hanya melalui struktur yang dimaknai bersama oleh segenap aktor yang terlibat di dalamnya secara intersubjektif. Karenanya, konstruktivisme lebih merupakan pemikiran idealis ketimbang materialis. Teori konstruktivisme pun menekankan hubungan yang saling konstitutif antara agen dan struktur. Kaum konstruktivisme menilai bahwa setiap aktor selalu menjadikan norma sebagai landasan mereka dalam berperilaku (Bakry, 2017).

Kaum konstruktivis menekankan pentingnya norma, kebudayaan, identitas, serta gagasan dalam menjelaskan perilaku para aktor (agen). Artinya, para aktor seringkali bertindak berdasarkan logika kepatutan dan konstruksi realitas yang mereka bangun serta yakini bersama. Kaum konstruktivis tidak meyakini adanya realitas yang *given* serta betul-betul objektif. Realitas (termasuk realitas hubungan internasional) merupakan realitas yang dikonstruksi oleh manusia dan bersifat intersubjektif. Dunia sosial (termasuk hubungan internasional) bukanlah sebuah dunia yang tetap/tidak berubah/*fixed* melainkan berubah sesuai dengan pemahaman bersama dari para aktor/agen yang terlibat.

Kaum konstruktivis melihat system internasional tidak bersifat *given* melainkan bisa berubah seturut pemahaman para aktor. Kaum konstruktivis meyakini bahwa perilaku negara-negara dibentuk oleh berbagai faktor yang dikonstruksi secara sosial, seperti sikap dan keyakinan para pembuat Keputusan dan pengambil kebijakan, norma-norma sosial, dan identitas. Sejumlah actor/agen juga secara aktif turut mengubah sistem internasional yang dikonstruksi tersebut melalui Tindakan-tindakan mereka. Singkatnya, konstruktivisme melihat sebuah sistem internasional yang secara inheren dinamis (Bakry, 2017).

Konstruktivisme lebih menekankan pada konstruksi kepentingan (*the construction of interest*). Konstruktivisme meyakini bahwa pengaruh system internasional pada pembentukan kepentingan nasional adalah bersifat sosial. Ini dikarenakan kepentingan merupakan produk dari identitas. Struktur kunci dari sistem internasional lebih bersifat intersubjektif ketimbang material. Kepentingan dan identitas suatu negara merupakan bagian penting yang dibangun oleh struktur sosial mereka dan bukan sesuatu yang *given* serta *fixed*. Artinya, negara-negara bertindak atas dasar persepsi yang mereka bentuk.

Dalam paradigma konstruktivisme, identitas dibentuk oleh berbagai faktor ideasional antara lain kebudayaan, agama, ilmu pengetahuan, dan keyakinan normatif. Identitas muncul

dari kondisi saling memengaruhi (interplay) antara setting dunia yang sesungguhnya dengan gagasan dan keyakinan yang berkembang di dalam kepala para aktor. Perbedaan perspektif juga bisa menjadi sangat vital. Identitas bukan merupakan karakteristik yang absolut yang melekat pada individu atau kelompok. Identitas pada dasarnya terus diproduksi dan direproduksi oleh individu atau kelompok itu sendiri.

Individu elite, baik dalam Masyarakat maupun negara, merupakan aktor yang paling penting. Gagasan dan identitas yang dimiliki para elite cenderung membentuk cara Masyarakat atau negara yang mereka pimpin dalam mengambil tindakan atau berperilaku dalam system internasional. Artinya, kita perlu melihat secara dekat pikiran dan keyakinan para pemimpin untuk menjelaskan apa yang mereka lakukan, dan apa yang dilakukan oleh masyarakat atau negara mereka. Gagasan tentunya diyakini dapat membentuk serta mengubah dunia. Contohnya, saat Michael Gorbachev melalui gagasan glasnost dan perestroika dapat membuat perubahan spesifik di uni soviet serta menunjukkan kepada dunia betapa gagasan seorang elite sungguh signifikan dalam mengubah serta membentuk dunia yang kita hidupi.

Lebih jauh, kaum konstruktivis meyakini beberapa proposisi antara lain: pertama, konstruktivis berpendapat bahwa dunia adalah apa yang kita yakini. Kedua, negara-negara beroperasi dalam sebuah Masyarakat madani global (global civil society). Ketiga, perubahan normatif adalah jalan utama di mana politik dunia berkembang dari waktu ke waktu. Terakhir, kaum konstruktivis meyakini bahwa elite-elite negara berada di dalam dan dipengaruhi oleh strategic culture yang membentuk pilihan-pilihan politik luar negeri.

2. Norm Entrepreneur

Salah satu paradigma besar dalam ilmu HI ialah konstruktivisme. Paradigma ini hadir kemudian ketimbang beberapa paradigma lain antara lain realisme, liberalisme, dan strukturalisme. Konstruktivisme menjadi pendekatan yang semakin signifikan digunakan dalam ilmu HI sejak tahun 1980-an (Jackson & Sorensen, 2013). Paradigma ini sekaligus mulai mewarnai perdebatan antarparadigma HI pasca pecahnya perang dingin (Reus-Smit, 2005). dalam pandangan kaum konstruktivis, aktor negara maupun aktor non negara berlomba membentuk norma dan nilai. Kaum konstruktivis melihat perubahan normatif adalah jalan utama bagi politik dunia untuk berkembang dari waktu ke waktu. Norma-norma lama berubah, tergantikan oleh norma-norma yang baru. Perubahan norma ini terjadi melalui proses pertukaran dan adanya jaringan transnasional. Norma sendiri umumnya dipahami

sebagai standar perilaku yang dianggap sesuai untuk sekumpulan aktor tertentu (Sikkink & Finnemore, 1995). Norma mengomunikasikan pemahaman tentang "kesesuaian" atau "keharusan" yang wajib ditaati agar tidak dinilai sebagai suatu perilaku yang menyimpang. (Sikkink & Finnemore, 1995). dalam konteks hubungan internasional pun terdapat berbagai norma internasional yang memberikan standar perilaku bagi para aktor hubungan internasional.

Berbagai norma internasional ini tentu tak lahir dari dunia antah berantah. Ia hadir melalui proses hubungan intersubjektif para aktor hubungan internasional. Tentu, ada pula aktor-aktor dalam hubungan internasional yang berperan sebagai agen yang aktif dalam menginisiasi dan mempromosikan norma-norma baru. Mereka inilah yang disebut sebagai norm entrepreneur. Merekalah aktor-aktor kunci yang mendorong perubahan normatif ke depan dan mampu meyakinkan para pengambil keputusan untuk menempatkan masalah dalam agenda politik. Merekalah pencipta dan promotor Norma-norma baru. Para norm entrepreneurs biasanya mengangkat masalah dan membingkainya untuk mencapai perubahan normatif di tataran global, sebagaimana keberhasilan norma apa pun bergantung pada keberhasilan kompetisi melawan norma yang ada dan status quo. Norm Entrepreneurs juga membutuhkan platform organisasi di mana mereka dapat mempromosikan norma mereka. Ini juga dapat melibatkan norma yang dilembagakan dalam aturan dan organisasi internasional tertentu, yang membantu mencapai penerimaan yang lebih luas terhadap norma-norma baru tersebut (Sikkink & Finnemore, 1995) Lebih jauh, Persepsi tentang suatu masalah dalam tatanan normatif yang berlaku atau ketidakpuasan terhadapnya biasanya dipandang sebagai penyebab para norm entrepreneur untuk mengangkat masalah tersebut dan mengajukan saran tentang bagaimana menyelesaikan masalah ini dan memasukkannya ke dalam agenda politik. Untuk tujuan ini, norm entrepreneur bertujuan untuk meningkatkan kesadaran publik tentang masalah tertentu dan secara aktif berusaha membujuk publik untuk mendefinisikan kembali minat dan preferensi mereka dan dengan demikian mengubah perilaku mereka yang telah disesuaikan dengan norma-norma baru tersebut.

Bertolak dari definisi norm entrepreneur di atas, penulis ingin menggunakan konsep norm entrepreneur sebagaimana telah dijabarkan di atas guna menjawab rumusan masalah perihal peran serta hambatan dan tantangan gereja katolik dalam mengimplementasikan ensiklik laudato si dan kaitannya terhadap kesadaran lingkungan komunitas katolik di makassar.

E. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Dalam menganalisis penelitian ini, penulis menggunakan tipe penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif terfokus pada pemahaman tentang suatu masalah atau fenomena yang akan digambarkan secara deskriptif. Menurut Denzin dan Lincon (2011), penelitian kualitatif adalah suatu metodologi yang menyediakan instrumen untuk dapat memahami makna secara mendalam mengenai fenomena yang kompleks serta proses yang terjadi pada kehidupan sosial secara praktis. Selanjutnya, Creswell (2010) mendefinisikan kualitatif sebagai metode untuk menggubah pernyataan teoretis berdasarkan perspektif konstruktif atau berdasarkan perspektif partisipatori, atau menggunakan keduanya. Dengan penggunaan pendekatan kualitatif dihasilkan temuan-temuan yang seringkali tidak dapat dihasilkan melalui penggunaan prosedur statistik maupun teknik kuantifikasi lainnya. Penekanan pendekatan kualitatif adalah orientasi pada pemahaman secara mendalam terhadap suatu topik penelitian, melalui pengumpulan data yang kemudian dianalisis secara sistematis oleh peneliti.

Metode penelitian kualitatif atau sering disebut dengan metode interpretive merupakan penelitian yang bersifat seni atau polanya tidak menentu sehingga hasil analisis penelitian lebih berfokus pada interpretasi yang telah di dapat dari data lapangan kemudian diolah menjadi sebuah informasi (Sugiyono, 2019). Metode kualitatif cenderung memiliki data-data yang berantakan kemudian data-data tersebut diolah oleh peneliti dengan cara mereduksi data yang ditemukan di lapangan menjadi informasi yang berbentuk deskriptif (Sugiyono, 2019). Penulis menggunakan tipe ini karena subjek penelitian adalah peran dan tantangan Gereja Katolik sebagai norm entrepreneur: studi kasus implementasi ensiklik *laudato si* di komunitas katolik di makassar. Penelitian kualitatif menggunakan lebih banyak subjek dibandingkan penelitian kuantitatif karena mengutamakan ketajaman data daripada kuantitasnya. Akibatnya, kualitas penelitian kualitatif ditentukan oleh seberapa dalam, lengkap, dan tereksplorasi data yang dikumpulkan. Melalui penelitian kualitatif, Penulis akan menjelaskan bagaimana peran dan tantangan gereja katolik sebagai norm entrepreneur: studi kasus implementasi ensiklik *laudato si* di komunitas katolik di makassar.

2. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah teknik wawancara mendalam dan telaah Pustaka (library research). Teknik telaah pustaka yaitu mengumpulkan data dari literatur yang relevan dan kemudian menganalisisnya. Dokumen,

buku-buku, jurnal-jurnal, surat kabar, situs web, dan laporan-laporan adalah semua jenis literatur yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti oleh penulis. Sedangkan, teknik wawancara adalah Teknik pengumpulan data melalui proses tanya jawab di antara yang melakukan penelitian dengan respondennya supaya mendapatkan informasi ataupun anggapan secara subjektif dari respondennya berkenaan dengan topik yang sedang dilakukan penelitian.

Pada penelitian ini wawancara semi terstruktur ini akan ditujukan kepada perwakilan umat dan Tokoh gereja. Adapun identitas narasumber yang akan peneliti wawancarai, antara lain:

1. Pastor Bernard Cakra Arrung Raya selaku Ketua Komisi Pengembangan Sosial Ekonomi (PSE) – Caritas Keuskupan Agung Makassar.
2. Bapak Yustinus selaku Ketua Harian Gerakan Laudato Si' Indonesia (GLSI) Chapter Makassar.
3. Bapak Norbertus Tri Suswanto Saptadi selaku Animator Laudato Si' Keuskupan Agung Makassar .

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer maupun data sekunder. Data primer berupa data yang dikumpulkan melalui metode wawancara mendalam . sedangkan, data sekunder diperoleh dengan cara mengumpulkan temuan dari sumber informasi seperti buku-buku yang membahas terkait ensiklik laudato si, jurnal ilmiah mengenai ensiklik laudato si, laman berita yang membahas bagaimana perkembangan penyebaran ensiklik laudato si, dokumen terkait ensiklik laudato si, serta laman web internet yang kredibel. Penelitian ini juga akan mencoba menggali informasi terkait penelitian terdahulu yang memiliki kesamaan skema untuk kemudian digunakan sebagai input baik dari segi konsep, konteks, dan analisis.

3. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah Teknik analisis data kualitatif. Teknik ini menggunakan analisis induktif dan bersifat deskriptif. Karenanya, akan dijabarkan fakta-fakta yang ada kemudian dihubungkan antara fakta yang satu dengan fakta yang lainnya untuk memperoleh sebuah kesimpulan yang baru.

4. Metode Penulisan

Penulisan skripsi ini akan menggunakan metode deduktif. Metode deduktif adalah teknik penalaran yang digunakan dalam ilmu untuk mencapai kesimpulan yang tepat secara sistematis. Metode ini menggunakan proses penalaran umum-khusus. Pertanyaan umum (atau hipotesis) dapat disajikan dan diuji kemungkinan mencapai kesimpulan khusus yang dapat diterima. Dalam metode ini, teori digunakan sebagai alat penelitian sejak pemilihan dan penemuan masalah, pembangunan hipotesis, pengamatan di lapangan, hingga pengujian data (Bungin, 2008).

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini, penulis akan melakukan tinjauan pustaka terkait dengan konsep yang digunakan dalam penelitian, yaitu Teori konstruktivisme dan Norm Entrepreneur. Secara lebih spesifik, penulis akan menjelaskan keterkaitan antara konsep-konsep tersebut dengan studi Ilmu Hubungan Internasional serta menyajikan beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan isu-isu yang dibahas dalam penelitian ini. Berikut penjelasannya:

A. Teori Konstruktivisme: Agen-Struktur

Ada sebuah paradigma baru yang muncul dalam lingkungan studi HI khususnya pasca perang dingin. Paradigma, pendekatan, atau teori baru ini lantas dikenal umum melalui istilah konstruktivisme. Karen M. Fierke dan Knud E. Jorgensen dalam bukunya “constructing international relations: the next generation” menegaskan bahwa paradigma konstruktivisme merupakan gagasan yang merupakan bagian dari tradisi berpikir orang eropa mengenai hubungan internasional (Fierke & Jorgensen, 2001). Penekanan ini diberikan guna membedakan konstruktivisme dari teori-teori HI sebelumnya yang umumnya dicetuskan oleh para pemikir amerika yang acapkali mengedepankan empirisme, rasionalisme, materialisme, dan pragmatisme (Bakry, 2017).

lahir sebagai semacam antitesis dari ketiadaan analisis yang mampu disajikan oleh para pemikir neorealis dan neoliberalis dalam memprediksi berakhirnya fase perang dingin. Para penganut konstruktivisme mengembangkan perspektif sosiologis dan antropologis tentang politik dunia yang menekankan pentingnya norma, peran identitas dalam pembentukan kepentingan dan tindakan, serta hubungan timbal balik yang saling konstitutif antara agen dan struktur. Konstruktivisme lebih mengedepankan metode serta gagasan interpretatif, diskursif, dan historical yang cenderung merepresentasikan sikap interpretivisme kritis.

Kaum konstruktivis meyakini bahwa struktur material memiliki signifikansi sosial hanya melalui struktur yang dimaknai bersama oleh segenap aktor yang terlibat di dalamnya secara intersubjektif. Karenanya, konstruktivisme lebih merupakan pemikiran idealis ketimbang materialis. Teori konstruktivisme pun menekankan hubungan yang saling konstitutif antara agen dan struktur. Kaum

konstruktivisme menilai bahwa setiap aktor selalu menjadikan norma sebagai landasan mereka dalam berperilaku (Bakry, 2017).

Kaum konstruktivis menekankan pentingnya norma, kebudayaan, identitas, serta gagasan dalam menjelaskan perilaku para aktor (agen). Artinya, para aktor seringkali bertindak berdasarkan logika kepatutan dan konstruksi realitas yang mereka bangun serta yakini bersama. Kaum konstruktivis tidak meyakini adanya realitas yang *given* serta betul-betul objektif. Realitas (termasuk realitas hubungan internasional) merupakan realitas yang dikonstruksi oleh manusia dan bersifat intersubjektif. Dunia sosial (termasuk hubungan internasional) bukanlah sebuah dunia yang tetap/tidak berubah/*fixed* melainkan berubah sesuai dengan pemahaman bersama dari para aktor/agen yang terlibat.

Kaum konstruktivis melihat sistem internasional tidak bersifat *given* melainkan bisa berubah seturut pemahaman para aktor. Kaum konstruktivis meyakini bahwa perilaku negara-negara dibentuk oleh berbagai faktor yang dikonstruksi secara sosial, seperti sikap dan keyakinan para pembuat Keputusan dan pengambil kebijakan, norma-norma sosial, dan identitas. Sejumlah aktor/agen juga secara aktif turut mengubah sistem internasional yang dikonstruksi tersebut melalui Tindakan-tindakan mereka. Singkatnya, konstruktivisme melihat sebuah sistem internasional yang secara inheren dinamis (Bakry, 2017).

Konstruktivisme lebih menekankan pada konstruksi kepentingan (*the construction of interest*). Konstruktivisme meyakini bahwa pengaruh sistem internasional pada pembentukan kepentingan nasional adalah bersifat sosial. Ini dikarenakan kepentingan merupakan produk dari identitas. Struktur kunci dari sistem internasional lebih bersifat intersubjektif ketimbang material. Kepentingan dan identitas suatu negara merupakan bagian penting yang dibangun oleh struktur sosial mereka dan bukan sesuatu yang *given* serta *fixed*. Artinya, negara-negara bertindak atas dasar persepsi yang mereka bentuk.

Dalam paradigma konstruktivisme, identitas dibentuk oleh berbagai faktor ideasional antara lain kebudayaan, agama, ilmu pengetahuan, dan keyakinan normatif. Identitas muncul dari kondisi saling memengaruhi (*interplay*) antara setting dunia yang sesungguhnya dengan gagasan dan keyakinan yang berkembang di dalam kepala para aktor. Perbedaan perspektif juga bisa menjadi sangat vital. Identitas bukan merupakan karakteristik yang absolut yang melekat

pada individu atau kelompok. Identitas pada dasarnya terus diproduksi dan direproduksi oleh individu atau kelompok itu sendiri.

Individu elite, baik dalam Masyarakat maupun negara, merupakan aktor yang paling penting. Gagasan dan identitas yang dimiliki para elite cenderung membentuk cara Masyarakat atau negara yang mereka pimpin dalam mengambil tindakan atau berperilaku dalam system internasional. Artinya, kita perlu melihat secara dekat pikiran dan keyakinan para pemimpin untuk menjelaskan apa yang mereka lakukan, dan apa yang dilakukan oleh masyarakat atau negara mereka. Gagasan tentunya diyakini dapat membentuk serta mengubah dunia. Contohnya, saat Michael Gorbachev melalui gagasan glasnost dan perestroika dapat membuat perubahan spesifik di uni soviet serta menunjukkan kepada dunia betapa gagasan seorang elite sungguh signifikan dalam mengubah serta membentuk dunia yang kita hidupi.

Lebih jauh, kaum konstruktivis meyakini beberapa proposisi antara lain: pertama, konstruktivis berpendapat bahwa dunia adalah apa yang kita yakini. Kedua, negara-negara beroperasi dalam sebuah Masyarakat madani global (global civil society). Ketiga, perubahan normatif adalah jalan utama di mana politik dunia berkembang dari waktu ke waktu. Terakhir, kaum konstruktivis meyakini bahwa elite-elite negara berada di dalam dan dipengaruhi oleh *strategic culture* yang membentuk pilihan-pilihan politik luar negeri.

Secara keseluruhan, minat akademis terhadap konstruktivisme sosial telah tumbuh karena beberapa keterbatasan analitis dan empiris dari teori konvensional yang telah mendominasi bidang teori Hubungan Internasional, seperti neoliberalisme dan neorealisme, mulai muncul. Salah satu keterbatasannya adalah teori-teori ini tidak menangkap secara memadai pengaruh ide, nilai, dan norma terhadap identitas dan kepentingan para aktor (Björkdahl, 2002).

Sebaliknya, pendekatan konstruktivis sosial dalam Hubungan Internasional mengklaim dapat memberikan pemahaman alternatif yang menyumbangkan wawasan teoretis baru mengenai pengaruh norma. Pendekatan ini berusaha melakukannya dengan mengklaim 'mengambil jalan tengah' dalam perdebatan teori Hubungan Internasional baru-baru ini antara apa yang beberapa orang, demi kesederhanaan, sebut sebagai perspektif 'rasionalis' dan perspektif 'refleksivis'. Pendekatan ini menantang dasar ontologis dan epistemologis dari perspektif refleksivis seperti postmodernisme, teori kritis sosial, dan post-strukturalisme,

serta perspektif rasionalis yang dicontohkan oleh neorealisme dan neoliberalisme. Karena para konstruktivis berbagi kepedulian dengan reflektivis terkait identitas dan wacana, mereka memiliki sikap ontologis yang serupa dan dengan demikian memberikan status ontologis independen pada fenomena ideasional, seperti norma (Björkdahl, 2002).

Posisi ontologis ini, bagaimanapun, tidak sejalan dengan kaum rasionalis, yang jarang mengutamakan materi ideatif dibandingkan objek material. Secara epistemologis, konstruktivisme sosial dapat menerima sains atau penjelasan kausal, sedangkan reflektivis pada umumnya menganggap kausalitas tidak relevan bagi ilmuwan sosial. Menurut interpretasi konstruktivisme sosial ini, ia memiliki epistemologi yang sebagian besar sama dengan perspektif rasionalis, tetapi menganut ontologi yang serupa dengan teori-teori reflektivis (Björkdahl, 2002).

Keinginan untuk mencampurkan epistemologi rasionalis dan ontologi reflektivis ini tidaklah tanpa masalah dan akibatnya, konstruktivisme 'jalan tengah' ini telah dikritik sebagai 'eklektik atau berlebihan'. Konstruktivisme bersifat eklektik dalam arti bahwa banyak peneliti memilih versi tertentu tanpa melihat koherensi epistemologis dan ontologis dari produk akhirnya. Lebih jauh, konstruktivisme disebut menjadi berlebihan ketika menyatakan hal yang jelas bahwa 'dunia di luar sana' adalah campuran fakta sosial dan materi—sebuah pernyataan yang diterima hampir semua teori (Björkdahl, 2002).

Banyak penelitian konstruktivis berupaya untuk fokus baik pada analisis norma itu sendiri maupun mekanisme kausal yang timbul dari norma tersebut. Karena konstruktivis sosial sering gagal mengidentifikasi mekanisme ini, mereka tidak mampu menawarkan argumen kausal tentang bagaimana norma dibangun dan disebarkan. Dalam beberapa kasus, efek kausal dari norma diasumsikan dan diimplikasikan daripada dibuktikan secara empiris menurut para kritikus arus utama.

Jacobsen menyatakan bahwa konstruktivis 'belum berhasil mengemukakan kasus tentang kekuatan ide'—bahwa ide memiliki kekuatan tersendiri. Namun, konstruktivis menunjukkan bahwa 'pendekatan ide selalu merupakan pelengkap yang berharga untuk model aktor rasional berbasis kepentingan'. Beberapa peneliti telah menguraikan 'mekanisme' kausal alternatif yang lebih baik dalam menjelaskan efek ide. Klotz, misalnya, menjabarkan dengan tiga mekanisme transmisi yang menghubungkan norma dan pilihan kebijakan; komunitas dan

identitas; reputasi dan komunikasi; serta diskursus dan institusi. Dalam kasus lain, efek kausal norma dikaitkan dengan sosialisasi, pembelajaran, dan propaganda.

B. Norm Entrepreneur

Norma dalam hubungan internasional didefinisikan sebagai gagasan dengan tingkat abstraksi dan spesifikasi yang bervariasi yang berkaitan dengan nilai-nilai mendasar, prinsip-prinsip pengorganisasian, atau prosedur yang distandarisasi. Norma ini beresonansi di antara negara-negara dan aktor global dalam bentuk kebijakan resmi, undang-undang, perjanjian, dan kesepakatan, sementara maknanya dapat stabil atau diperdebatkan.

Kaum konstruktivis melihat perubahan normatif adalah jalan utama bagi politik dunia untuk berkembang dari waktu ke waktu. Norma-norma lama berubah, tergantikan oleh norma-norma yang baru. Perubahan norma ini terjadi melalui proses pertukaran dan adanya jaringan transnasional. Norma sendiri umumnya dipahami sebagai standar perilaku yang dianggap sesuai untuk sekumpulan aktor tertentu (Sikkink & Finnemore, 1995).

Norma mengomunikasikan pemahaman tentang "kesesuaian" atau "keharusan" yang wajib ditaati agar tidak dinilai sebagai suatu perilaku yang menyimpang. (Sikkink & Finnemore, 1995). dalam konteks hubungan internasional pun terdapat berbagai norma internasional yang memberikan standar perilaku bagi para aktor hubungan internasional.

Pendekatan klasik dalam studi hubungan internasional biasanya memprioritaskan kekuatan material, atau kemampuan, suatu negara terhadap negara lain di dunia. Namun, berakhirnya Perang Dingin memberikan kesempatan untuk mengevaluasi secara kritis bagaimana kita memandang kekuasaan dalam politik global, karena begitu banyak kerangka teoretis dipertanyakan. Dalam beberapa tahun terakhir, para sarjana telah mulai fokus pada bagaimana negara-negara menggunakan pengaruh dengan cara yang tidak semata-mata sesuai dengan kemampuan ekonomi dan militer.

Alih-alih melihat sistem internasional sebagai terpecah dan anarkis, gelombang baru penelitian meneliti bagaimana negara-negara disosialisasikan ke dalam komunitas atau masyarakat internasional. Dalam komunitas ini, terdapat praktik-praktik yang sudah mapan, kode etik, dan standar perilaku yang dapat diterima, yang disebut sebagai 'norma', yang memengaruhi kepentingan dan identitas negara. Lebih banyak teoritis telah mulai mempelajari interaksi antara

negara dan aktor non-negara, yang dipahami sebagai bagian dari masyarakat sipil global (Clark et al., 1998: 1–35).

Dengan demikian, konsepsi ideasional dan normatif tentang politik telah menerima lebih banyak perhatian, yaitu ada pengakuan tentang bagaimana negara tidak hanya mengejar ekspansi teritorial, kekayaan material, dan memaksimalkan kekuasaan pada skala global, tetapi juga peduli dengan reputasi, identitas, dan komunitas (Klotz, 1995; Finnemore, 1996; Katzenstein, 1996).

Belakangan ini, 'fenomena ideasional' sekali lagi menjadi fokus utama dalam agenda penelitian Hubungan Internasional dan menjadi modis secara intelektual untuk membahas pentingnya norma dalam bidang ini. Perubahan terbaru dalam hubungan internasional telah menciptakan situasi di mana perilaku negara bergantung lebih sedikit pada distribusi kekuatan dan lebih pada kekuatan lembut dari ide, nilai, dan norma. Norma dianggap penting karena berfungsi untuk membimbing perilaku dengan memberikan motivasi untuk bertindak. Dalam dekade terakhir, penelitian tentang norma telah mengambil 'perubahan konstruktivis sosial'. Menyatakan bahwa norma itu penting tidak lagi kontroversial; para sarjana kini lebih fokus pada bagaimana, kapan, dan mengapa norma muncul dan berkembang (Björkdahl, 2002).

Masalah utama dalam konseptualisasi norma internasional adalah bagaimana secara empiris mungkin untuk mengenali suatu norma. Seperti halnya dengan sebagian besar motivasi tindakan politik lainnya, seringkali hanya ada bukti tidak langsung tentang keberadaan suatu norma. Oleh karena itu, pengaruh norma dapat dipelajari dengan menganalisis pola perilaku yang dipengaruhi oleh norma tersebut. Selain itu, karena norma secara definisi bersifat dibagi dan intersubjektif serta terkait dengan penilaian moral bersama—‘mereka bukan sekadar kekhasan individu’—bukti keberadaan norma dapat ditemukan dalam wacana yang membahas perilaku tertentu, yaitu retorika. Karena norma dipegang secara kolektif, norma sering dibahas sebelum tercapai konsensus. Seringkali, norma mendorong pembenaran untuk suatu tindakan dan meninggalkan jejak komunikasi yang dapat dipelajari. Cara negara berbicara tentang norma seringkali sama pentingnya, jika tidak lebih, daripada cara mereka bertindak. Oleh karena itu, fokus eksklusif pada tindakan hanya akan mengakui norma setelah negara

memutuskan untuk mematuhi norma yang dimaksud atau bertindak berdasarkan norma tersebut (Björkdahl, 2002)

Karena norma bervariasi seiring waktu dan sering bergantung pada konteks, sifatnya yang sulit ditangkap menimbulkan masalah analitis yang serius. Ada banyak definisi norma, yang saling berkonvergensi dan tumpang tindih—berasal dari tradisi filosofis dan pendekatan teoretis yang berbeda. Perspektif rasionalis, misalnya, menyoroti keteraturan dan konsistensi perilaku. Tradisi penting untuk memahami norma sebagai perilaku—yang dikodifikasikan dan diritualisasikan seiring waktu. Norma dianggap sebagai standar perilaku, yang didefinisikan dalam hal hak dan kewajiban. Dalam pengertian ini, norma adalah pedoman umum perilaku yang mengatur niat dan akibat (Axelrod, 1986).

Definisi komprehensif diberikan oleh Raymond, yang menyatakan bahwa norma internasional adalah 'standar perilaku umum yang menentukan cakupan hak suatu negara, tingkat kewajibannya, dan jangkauan yurisdiksinya' (Raymond, 1997). Norma ada dalam suatu lingkungan sosial tertentu sejauh individu biasanya bertindak dengan cara tertentu. Norma mewakili 'standar perilaku yang ditentukan dalam hal hak dan kewajiban' (Krasner, 1982).

Thomson mengklaim bahwa definisi yang paling berguna dari norma internasional adalah 'sebagai praktik negara yang normal' dan itu adalah norma 'hanya bahwa "sebagai aturan" negara-negara menjalankan praktik tersebut'. Selain itu, perspektif rasionalis sering menekankan pentingnya kepatuhan terhadap norma. Penekanan pada sanksi sebagai hal yang diperlukan untuk kepatuhan membawa kekuasaan ke dalam analisis. Konsep sanksi berarti bahwa aktor dengan kekuasaan bersedia dan mampu menggunakan paksaan untuk menegakkan norma. Dalam hal ini, Goertz dan Diehl menyimpulkan bahwa norma tidak dapat dianggap semata-mata sebagai 'serangkaian "seharusnya"', tetapi kemungkinan adanya sanksi juga merupakan komponen penting (Goertz & Diehl, 1992). Oleh karena itu, pandangan norma sebagai perilaku standar ini juga mencakup anggapan bahwa aktor sering dihukum ketika mereka melanggar norma.

Perspektif sosiologis tentang norma juga mengacu pada praktik yang normal, lazim, dan umum dalam sistem internasional. Definisi yang berasal dari sosiologi menekankan keteraturan, hal yang normal, dan keseragaman dalam perilaku. Misalnya, Gurowitz mendefinisikan norma sebagai 'hasil dari praktik umum di

antara negara-negara'. Jenis definisi ini, meskipun berfokus pada keteraturan dalam perilaku, cenderung mengabaikan aspek normatif dari norma. Jelas, tidak semua norma bersifat normatif atau moral. Definisi Klotz tentang norma sebagai 'pemahaman bersama (dengan demikian sosial) tentang standar perilaku' dikombinasikan dengan penekanan pada fakta bahwa tidak semua norma bersifat moral. 'Standar dapat memiliki asal-usul dan tujuan fungsional serta non-etis.'

Sebaliknya, perspektif normatif memandang norma sebagai preskripsi moral (normatif) yang menekankan keadilan dan hak melalui norma moral atau etika perilaku. Hal ini didasarkan pada kemungkinan adanya pilihan moral. Norma berkaitan dengan kelayakan sarana dan tujuan itu sendiri. Oleh karena itu, elemen kedua dari karakteristik norma adalah normatif. Hingga saat ini, elemen normatif, seperti isu keadilan dan hak, belum diakui. Agar norma menjadi normatif, perlu ditambahkan rasa kewajiban, dan perilaku harus didorong oleh norma. Konsep Bull tentang aturan mirip dengan karakter normatif atau preskriptif dari norma. Bull menyatakan bahwa 'aturan adalah prinsip imperatif umum yang mengharuskan atau memberi wewenang kepada kelas orang atau kelompok tertentu untuk berperilaku dengan cara yang ditentukan'. Dimensi preskriptif dari norma tidak bisa dihindari, karena norma melibatkan 'kelayakan' dan perhatian terhadap perilaku yang tepat. Apa yang dianggap tepat hanya diketahui dengan merujuk pada komunitas sosial tertentu.

Dari perspektif konstruktivis, norma umumnya dianggap sebagai seperangkat pemahaman intersubjektif dan harapan kolektif mengenai perilaku yang tepat dari negara dan aktor lain dalam konteks atau identitas tertentu. Norma melibatkan evaluasi kolektif dan harapan masa depan tentang perilaku dalam hal apa yang seharusnya dilakukan. 'Norma memang mendorong harapan tentang perilaku' dan harapan-harapan ini berkontribusi pada kemungkinan norma akan diikuti. Katzenstein menggunakan norma untuk menggambarkan 'harapan kolektif mengenai perilaku yang tepat dari aktor dengan identitas tertentu'.

Definisi istilah 'norma' ini dan yang dibahas di atas tidak memberikan fokus analitis yang cukup. Saat mendefinisikan norma, seseorang harus memisahkan keberadaan dan kekuatan norma dari perubahan perilaku yang sebenarnya. Alasan utamanya adalah bahwa pertanyaan yang menarik dalam penelitian norma adalah efek norma terhadap perilaku negara. Oleh karena itu, menurut Legro, norma harus dikonseptualisasikan dengan cara 'yang independen dari efek yang dikaitkan

dengannya'. Selain itu, norma harus didefinisikan terpisah dari masalah penegakan dan kepatuhan.

Norma biasanya digambarkan sebagai sesuatu yang mengatur, membentuk, atau memungkinkan para pelaku dalam lingkungan mereka. Perbedaan yang paling umum adalah antara norma yang regulatif dan normatif. Norma regulatif yang menentukan, melarang, dan mengatur perilaku telah mendapatkan banyak perhatian dari kalangan akademisi. Norma-norma ini berfungsi seperti standar yang menentukan pelaksanaan yang tepat dari identitas yang sudah ditetapkan dan menetapkan hak serta kewajiban. Sebuah metafora untuk norma yang cenderung menangkap makna regulatif dari norma internasional adalah dengan menyamakan norma dengan 'aturan lalu lintas'. Hal ini berarti bahwa norma memengaruhi kebijakan karena mereka dapat berfungsi sebagai peta jalan—peran yang 'berasal dari kebutuhan individu untuk menentukan preferensi mereka sendiri atau untuk memahami hubungan sebab-akibat antara tujuan mereka dan strategi politik alternatif yang digunakan untuk mencapai tujuan tersebut'.

Norma kemudian dapat menjadi penting ketika prinsip normatif yang mereka cerminkan memberikan aktor alternatif strategi politik untuk mencapai tujuan mereka. Hal ini tidak selalu memberi tahu kita norma mana yang akan mendominasi. Ini hanya memandang norma sebagai perangkat yang memungkinkan atau membatasi pilihan kebijakan. Norma juga memungkinkan dengan mengizinkan tindakan tertentu yang seharusnya tidak dapat dilakukan. Norma dipandang sebagai proses yang memungkinkan yang diperlukan untuk mencapai hasil yang saling menguntungkan dan bersifat kooperatif. Norma konstitutif menciptakan aktor, kepentingan, atau kategori tindakan baru. Namun, batas antara norma yang memungkinkan dan konstitutif agak kabur. Norma konstitutif memberi makna pada tindakan, sedangkan norma yang memungkinkan memperbolehkan tindakan tertentu, dan kedua hal ini merupakan kontras yang jelas dengan norma regulatif. Dalam beberapa situasi, norma 'mendefinisikan identitas seorang aktor, sehingga memiliki "efek konstitutif" yang menentukan tindakan apa yang akan membuat pihak lain yang relevan mengakui identitas tertentu'. Oleh karena itu, norma terkait langsung dengan identitas kolektif, dan dianggap saling terkait dengan kepentingan diri. Norma dan kepentingan saling membentuk satu sama lain.

Seiring waktu, norma-norma konstitutif dan regulatif menjadi norma-norma praktis, yang diinstitutionalisasi ke dalam praktik sehari-hari dan interaksi dalam komunitas internasional. Norma-norma praktis oleh karena itu juga dapat dianggap sebagai satuan instruksional yang mengarahkan perilaku para pelaku. Norma-norma praktis ini berfokus pada gagasan yang umum diterima tentang 'praktik terbaik' dan 'solusi terbaik' serta bersifat reaktif dengan mengusulkan alternatif tindakan. Kratochwil, sejalan dengan pandangan Max Weber, berpendapat bahwa norma dan aturan harus dianggap sebagai perangkat yang membimbing tindakan dalam lingkungan sosial dan politik tertentu. Dengan mendorong fungsi khusus dan praktik yang berulang, norma-norma memfasilitasi koordinasi tindakan.

Jika seseorang memahami norma-norma yang penting dalam pelaksanaan politik internasional, maka asal-usul norma menjadi topik alami untuk dipelajari. Tinjauan literatur yang relevan mengungkap sejumlah proses dan mekanisme yang dapat meningkatkan pemahaman kita tentang asal-usul norma internasional, seperti praktik sosial, proses internasional dan domestik, proses yang didorong oleh permintaan atau penawaran, serta proses evolusioner. Dalam sebagian besar proses ini, para aktor memainkan peran penting, dan secara umum interaksi antara struktur dan aktor merupakan kekuatan pendorong utama dalam evolusi norma.

Asal-usul norma dimulai dengan pasokan ide baru yang tersedia bagi aktor. Ide-ide baru ini bisa lahir dari kepentingan kelompok, atau berasal dari tulisan para intelektual. Sejumlah peneliti menelusuri asal-usul norma internasional ke norma domestik dan menunjukkan bagaimana norma domestik menjadi internasional melalui upaya aktor dari berbagai jenis. Norma domestik dapat menyebar ke tingkat global. Jika berhasil, norma domestik akan menjadi terglobalisasi dan distandarisasi melalui proses sosialisasi ketika anggota baru mengikuti perilaku yang ditetapkan. Peningkatan minat domestik terhadap ide atau norma baru dapat memfasilitasi adopsi norma internasional di tingkat domestik. Sebaliknya, penelitian telah menunjukkan bahwa norma dapat disalin dari arena internasional dan diinstitutionalisasi di tingkat domestik. Norma internasional sering menjadi sumber ide penting untuk perubahan kebijakan negara. Standar normatif domestik dan internasional, bagaimanapun, telah mendekati satu sama lain dan adanya 'domestikasi' norma internasional.

Mekanisme dan proses di balik munculnya norma menggambarkan kegunaan pendekatan 'pemahaman penjelas', yang memungkinkan adanya kausalitas yang lunak. Namun, penelitian tentang norma memiliki satu masalah yang berulang—yaitu, belum mampu menjelaskan mengapa norma tertentu dipilih dibanding yang lain dan menjadi tertanam dalam struktur normatif secara keseluruhan. Masalah ini ditunjukkan oleh Risse-Kappen, yang menyadari bahwa 'penelitian sejauh ini gagal menentukan kondisi di mana ide-ide tertentu dipilih dan memengaruhi kebijakan sementara ide lainnya terabaikan'. Pekerjaan teoretis yang terbatas sejauh ini sebagian besar berfokus pada mekanisme proses 'pembangunan norma'.

Singkatnya, artikel ini mengakui pandangan yang banyak diterima mengenai norma sebagai pola perilaku. Perilaku standar tidak selalu menciptakan norma perilaku. Sebaliknya, norma bisa saja tercipta sebagai akibat dari hanya satu preseden. Selain itu, 'norma tidak selalu menunjukkan perilaku nyata; melainkan mereka menunjukkan gagasan tentang apa yang seharusnya menjadi perilaku yang tepat.' Untuk alasan itu, dibutuhkan perbedaan antara norma yang menekankan hal yang normal dan yang menekankan hal yang normatif. Perhatian yang lebih sedikit diberikan pada kualitas normatif atau preskriptif dari norma internasional. Ini aneh, karena 'justru kualitas preskriptiflah yang membedakan norma dari jenis aturan lainnya.' Akibatnya, norma dianggap mengekspresikan nilai-nilai yang menciptakan hak dan tanggung jawab baru. Norma adalah struktur sosial yang terdiri dari pengetahuan bersama dan pemahaman intersubjektif. Oleh karena itu, dari perspektif konstruktivis, kepentingan tidak dapat ditentukan secara terpisah dari ide dan norma. Norma juga dipandang sebagai pencipta harapan akan perilaku yang sesuai dalam masyarakat internasional.

Menurut Onuf, norma sekaligus bersifat konstitutif dan regulatif. Ini menunjukkan bahwa norma dapat dilihat dengan cara berikut: Norma adalah pemahaman intersubjektif yang membentuk kepentingan dan identitas aktor, serta menciptakan ekspektasi sekaligus menetapkan perilaku apa yang seharusnya dianggap tepat.

Para teoritikus hubungan internasional telah meneliti bagaimana norma menjadi menonjol, kapan norma menjadi terinstitusionalisasi, dan bagaimana norma membentuk atau menentukan kepentingan serta identitas negara. Tidak semua norma berpengaruh, atau hegemonik, dalam politik internasional. Norma

dapat hidup berdampingan, bertentangan, atau gagal diakui oleh mayoritas negara dalam komunitas internasional.

Namun, menelusuri mengapa negara sebaiknya mengejar kebijakan tertentu, atau berpartisipasi dalam kerja sama internasional, telah memperkenalkan bidang penelitian baru yang menarik — selama para ilmuwan mengakui adanya variasi dalam kekuatan, legitimasi, dan kepentingan norma internasional (Cortell dan Davis, 1996: 2).

Dalam tinjauan literatur norma yang diterbitkan di International Organization (1998), Martha Finnemore dan Kathryn Sikkink menentukan tiga tahap dalam siklus hidup norma. Tahap pertama adalah munculnya norma, tahap kedua adalah penerimaan norma, dan tahap terakhir adalah internalisasi norma. 'Norma tidak muncul begitu saja; mereka secara aktif dibangun oleh agen yang memiliki gagasan kuat tentang perilaku yang tepat atau diinginkan dalam komunitas mereka' (1998: 896). Agar norma muncul, agen (individu, negara, atau aktor masyarakat) bertindak sebagai 'norm entrepreneur', memobilisasi dukungan untuk standar kesesuaian tertentu dan meyakinkan negara untuk mengadopsi norma baru (hlm. 897–901). Jadi, norm entrepreneur adalah agen yang berperan melahirkan dan menyebarkan suatu norma baru.

Agar norma dapat 'diterima' (fase kedua dari siklus hidup norma), harus ada bukti efek penularan atau sosialisasi: negara-negara mematuhi norma tersebut meskipun tidak ada tekanan domestik. Dan akhirnya, norma menjadi terinternalisasi sehingga 'kepatuhan terhadap norma menjadi hampir otomatis', atau tidak dipertanyakan (hal. 904).

Analisis ini memperluas studi tentang norma dan menelusuri bagaimana serta mengapa sekelompok negara tertentu muncul sebagai 'norm entrepreneur' dalam politik internasional. Tidak hanya norma internasional dipertahankan dan ditegakkan oleh mereka yang memiliki kekuatan dominan, norma-norma tersebut juga berasal dari sekelompok negara yang memiliki gagasan yang berbeda tentang bentuk intervensi domestik dan internasional yang tepat. Oleh karena itu, adakalanya ada negara kecil yang lemah secara militer dan bergantung secara ekonomi, mengejar 'kekuatan sosial' dengan bertindak sebagai norm entrepreneur dalam komunitas internasional. Dalam tiga bidang kebijakan (lingkungan, keamanan internasional, dan kesejahteraan global), berbagai negara telah

bertindak untuk mempromosikan pandangan tertentu tentang masyarakat yang baik.

Sementara beberapa kritikus mungkin melihat peran norm entrepreneur sebagai tindakan strategis oleh negara kecil, hal ini tidak mengabaikan efek dari upaya berbagai negara dalam mengejar berbagai model interaksi, model-model yang membentuk pilihan yang tersedia bagi negara-negara dalam politik internasional.

Berbagai negara menjadi norm entrepreneur dalam politik internasional kontemporer justru karena posisi geografisnya yang terpencil, kemampuan material yang terbatas, dan institusi domestik yang unik. Dengan upaya konsisten negara/institusi swasta untuk mempromosikan pandangannya dan memperkuat norma internasional tertentu, negara-negara atau institusi ini telah memperoleh reputasi global sebagai mitra negosiasi yang dapat dipercaya dan efektif. Reputasi ini secara sadar dikembangkan dan diperdalam sebagai batu penjurur hubungan diplomatik suatu negara/institusi.

Artinya, suatu negara/institusi secara sadar memproduksi atau menyebarluaskan suatu norma dan kemudian menjadi norm entrepreneur agar negara atau institusi tersebut mempunyai suatu modal sosial dan kekuatan tersendiri dalam berdiplomasi di tengah pertarungan politik global.

Kita bisa melihat praktik nyata dari peran norm entrepreneur yang dimainkan misalnya oleh negara-negara di skandinavia (Denmark, Norway, Sweden, Finland, dan Iceland). Ada tiga bidang masalah di mana negara-negara Skandinavia bertindak sebagai pelopor norma dalam politik internasional. Praktik pembangunan berkelanjutan, penyelesaian konflik secara damai, dan norma pemindahan sumber daya dari negara kaya ke negara miskin telah diperkuat oleh kepemimpinan yang ditunjukkan oleh Skandinavia, serta melalui partisipasi Skandinavia dalam institusi internasional.

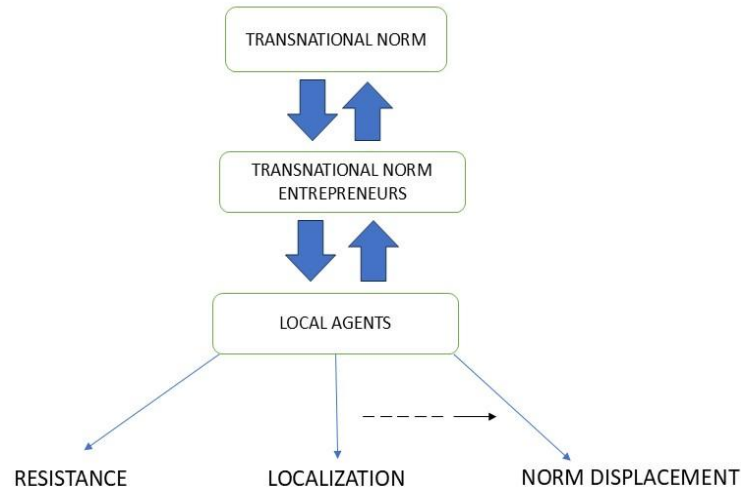
Tentu dalam politik internasional yang dinamis dan barangkali anarkis ini, Upaya penyebarluasan norma yang diinisiasi oleh suatu negara/institusi tidak lantas diterima baik oleh setiap negara/entitas lainnya. Tentu ada pertarungan wacana, pertarungan kepentingan di level global yang berindikasi pada pertarungan norma di tataran global. Dalam artian, apakah suatu norma kemudian diterima secara luas dalam masyarakat global ataukah malah di-counter oleh negara lain melalui norma tandingan atau wacana tandingan.

Terkait dengan penjelasan di atas, kita bisa melihat sebuah contoh yang cukup gamblang. Di era tata kelola multilateral, negara Amerika Serikat misalnya telah berulang kali mengkonfrontasi paradigma alternatif, atau norma, yang dipromosikan oleh negara-negara Skandinavia. Sebabnya kira-kira cukup jelas yakni amerika berseberangan kepentingannya dengan negara-negara skandinavia tersebut. Artinya, terjadi kontestasi atau pertarungan norma di tataran global.

Namun, norma-norma ini belum sepenuhnya diterima — dan juga belum menggantikan paradigma yang bersaing mengenai pembangunan, manajemen konflik, atau penyediaan bantuan. Industrialisasi masih menjadi prioritas — dengan perhatian yang minim terhadap isu lingkungan di beberapa bagian dunia. Negara-negara terus mengandalkan senjata pemusnah massal, dan menerapkan konsep *deterrence* ketika sarana lain untuk pencegahan konflik gagal.

Meskipun pemerintah secara retorik berkomitmen pada tujuan kemanusiaan, kontribusi bantuan luar negeri dari negara-negara di luar Skandinavia tidak meningkat secara signifikan. Sebaliknya, negara-negara di Skandinavia secara konsisten telah menghadirkan norma-norma yang mampu bersaing dalam komunitas internasional. Salah satu norma tersebut (pembangunan berkelanjutan) telah mencapai tahap paling jauh dalam siklus hidup norma, dan telah diinternalisasi oleh lembaga pembangunan, LSM, Perserikatan Bangsa-Bangsa, Uni Eropa, dan komunitas akademis. Lembaga-lembaga ini mengadopsi praktik-praktik yang dirancang untuk meningkatkan kualitas kehidupan manusia sesuai dengan kriteria ekologis.

Gambar 1. Local responses to transnational norm



Sumber: Acharya 2004

Dari pola respons lokal terhadap transnasional norma di atas, peneliti lantas membuat bagan/alur kerja transmisi norma dari level global hingga ke tataran lokal secara khusus dalam konteks penelitian ini yakni bagaimana gereja katolik berusaha menyebarkan norma lingkungan melalui ensiklik *laudato si'* hingga ke tataran lokal khususnya di keuskupan agung makassar.

Kalau kita mengacu pada definisi lokalisasi yang diusung oleh amitav acharya, kita setidaknya dapat melihat bahwa lokalisasi norma merupakan suatu tahapan di mana tugas dan instrumen baru diciptakan, dan norma target digeser atau diubah secara signifikan; hierarki norma tetap tidak berubah; lembaga asli tetap ada, meskipun mungkin ada lembaga baru yang meniru hierarki norma dan desain/model kelembagaan yang ada. (Acharya, 2004)

Tabel 1. The trajectory of Localization and Conditions for Progress

<p>Prelocalization (resistance and contestation)</p>	<p>Aktor lokal mungkin menolak norma eksternal baru karena keraguan tentang kegunaan dan penerapan norma tersebut serta ketakutan bahwa norma itu bisa merusak kepercayaan dan praktik yang sudah ada. Perselisihan ini mungkin mengarah pada lokalisasi jika beberapa aktor lokal mulai melihat norma eksternal tersebut memiliki potensi untuk berkontribusi pada legitimasi dan efektivitas institusi yang ada tanpa merusaknya secara signifikan. Kondisi 1: Beberapa aspek dari tatanan normatif yang ada tetap kuat dan sah, meskipun aspek lain mungkin sudah kehilangan kepercayaan dari dalam atau dianggap tidak memadai untuk menghadapi tantangan baru dan tak terduga.</p>
<p>Local initiative (entrepreneurship and framing)</p>	<p>Aktor lokal meminjam dan membingkai norma eksternal dengan cara yang menegaskan nilai mereka bagi audiens lokal. Kondisi 2: Harus ada aktor lokal yang bersedia dan kredibel ~pendukung dari dalam; Aktor-aktor ini tidak boleh terlihat sebagai 'agen boneka' dari kekuatan luar. Prospek untuk lokalisasi akan terbantu jika masyarakat lokal mereka telah mengembangkan reputasi sebagai sesuatu yang unik.</p>
<p>Adaptation (grafting and pruning)</p>	<p>Norma eksternal dapat direkonstruksi untuk sesuai dengan kepercayaan dan praktik lokal bahkan ketika kepercayaan dan praktik lokal</p>

	<p> mungkin disesuaikan sesuai dengan norma eksternal. Untuk menemukan kesamaan ini, aktor lokal dapat mendefinisikan kembali norma eksternal, menghubungkannya dengan norma dan praktik lokal yang ada secara spesifik dan memangkas norma eksternal, memilih elemen-elemen yang sesuai dengan struktur normatif yang sudah ada dan menolak yang tidak sesuai. Kondisi 3: Harus ada ruang untuk menyambungkan norma eksternal dengan beberapa aspek dari hierarki norma yang sudah ada. Meminjam atau menambah, daripada menggantikan, hierarki norma yang ada.</p>
Amplification and universalization	<p> Instrumen dan praktik baru dikembangkan dari kerangka normatif sinkretik di mana pengaruh lokal tetap sangat terlihat. Kondisi 4: Peminjaman dan modifikasi harus memberikan ruang bagi beberapa elemen dari hierarki norma yang ada untuk mendapatkan pengakuan eksternal yang lebih luas melalui asosiasinya dengan norma asing.</p>

Sumber: Acharya 2004

Tabel 2. Respons Lokal terhadap Norma Transnasional

Resistence	<p> tidak ada tugas dan instrumen baru yang dibuat, dan norma target serta model institusional tetap sebagian besar utuh. perlawanan yang terlalu besar dan berkepanjangan menyebabkan kegagalan transmisi norma</p>
------------	--

Localization	tugas dan instrumen baru diciptakan, dan norma target digeser atau diubah secara signifikan. hierarki norma tetap tidak berubah. lembaga asli tetap ada, meskipun mungkin ada lembaga baru yang meniru hierarki norma dan desain/model kelembagaan yang ada
Norm displacement	tugas dan instrumen baru diciptakan, norma target digantikan, dan hirarki norma berubah. Hasilnya, institusi baru (yang tidak mempunyai banyak kemiripan dengan yang sebelumnya) muncul, atau institusi lama mengalami perubahan signifikan.

Sumber: Acharya 2004

Lebih jauh, Target norm merujuk pada norma sebelumnya yang ingin diencerkan atau digantikan oleh norm entrepreneur, baik yang berasal dari luar (outsider) maupun dari dalam (insider). Sedangkan, Norm hierarchy merujuk pada tingkat kepentingan target norm dalam kaitannya dengan norma-norma inti lainnya dari institusi tersebut.

C. Penelitian Terdahulu

Untuk memperkuat penelitian ini, penulis merujuk pada beberapa literatur yang relevan dengan topik yang dibahas. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada penulis mengenai Peran Gereja Katolik Dalam Implementasi Ensiklik Laudato Si' Terhadap Kesadaran Lingkungan Hidup Di Komunitas Katolik Di Makassar.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teori konstruktivisme dan konsep norm entrepreneur. Dari segi metodologi, penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif khususnya melalui metode wawancara mendalam yang bertujuan untuk menganalisis Peran Gereja Katolik dalam Mempromosikan Norma Lingkungan yang Diusung oleh Ensiklik Laudato Si' di Lingkup Keuskupan Agung Makassar dan Tantangan yang Dihadapi oleh Keuskupan Agung Makassar dalam Mengimplementasikan Norma-Norma

Lingkungan dari Ensiklik Laudato Si' di Tingkat Komunitas Lokal Khususnya di Kevikepan Makassar. Berikut adalah beberapa literatur yang menjadi rujukan dalam proses penulisan ini yang bertujuan memberikan landasan teoretis dan pemahaman yang mendalam mengenai isu-isu terkait:

Tabel 3. Penelitian Terdahulu

Judul Penelitian	Penulis	Tahun	Fokus Penelitian
Russia-Ukraine War: A Constructivist Analysis	Muhammad Monaqib Hayat	2022	Penelitian ini berupaya menganalisis perang Rusia-Ukraina melalui lensa konstruktivisme sosial. Dengan menyoroti identitas, norma, dan kepentingan yang saling bertentangan di antara aktor yang terlibat dalam konflik, studi yang dilakukan berargumen bahwa isu politik dikonstruksi menjadi isu keamanan oleh manajer strategis Rusia. Berdasarkan argumen inti ini, penelitian ini membahas dua bidang utama: peran identitas yang bertentangan antara aktor dalam memperburuk konflik dan persepsi antar manajer strategis Rusia. Sejalan dengan pandangan ini, penelitian ini fokus pada budaya strategis Rusia untuk menjelaskan keterikatan manajer strategis Rusia terhadap penyebab konflik sejak awal. Untuk mendemonstrasikan hal ini, metode kualitatif digunakan guna mengembangkan

			<p>pemahaman komprehensif tentang konflik tersebut.</p> <p>Penelitian ini menyimpulkan bahwa celah antara Ukraina dan Rusia berakar dalam sejarah dan identitas kolektif mereka yang telah berkembang menjadi perang total dan hanya bisa diselesaikan jika semua pihak mengadopsi pendekatan keamanan yang objektif.</p>
<p>The EU as a Norm Entrepreneur in Education Policy: An Analysis of the Diffusion of European Ideas and Policies</p>	<p>Tonia Bieber</p>	<p>2016</p>	<p>Dalam beberapa tahun terakhir, tantangan baru seperti meningkatnya mobilitas tenaga kerja, meningkatnya ketimpangan pasar, perubahan teknologi yang memihak keterampilan tertentu, perubahan demografis, dan meningkatnya utang publik semakin memengaruhi kemampuan sistem kesejahteraan Eropa untuk secara efektif terlibat dalam pembuatan kebijakan sosial dan ekonomi.</p> <p>Penyediaan dan regulasi kebijakan sosial oleh publik, bagaimanapun, merupakan faktor inti dalam mendorong kohesi sosial Eropa dan dengan demikian, legitimasi Uni Eropa (UE) sebagai salah satu organisasi regional terkuat. Salah satu hak kewarganegaraan sosial</p>

			<p>utama adalah akses ke pendidikan. Hak-hak ini memungkinkan anggota masyarakat untuk berpartisipasi dalam kemakmuran ekonomi, sosial, dan budaya, dan dengan demikian dimaksudkan untuk mengurangi ketimpangan sosial. Karena UE juga menganggap dirinya sebagai serikat sosial, kebijakan pendidikan telah menjadi pusat upaya kerja sama.</p> <p>Selain itu, sebagai respons terhadap tantangan terbaru seperti krisis ekonomi dan keuangan yang dimulai pada tahun 2007, Uni Eropa telah mengembangkan 'Strategi Pertumbuhan Eropa 2020' untuk mendorong ekonomi regional dengan tujuan mempromosikan kohesi sosial, lapangan kerja, dan produktivitas. Oleh karena itu, Komisi mengusulkan lima target UE yang harus dicapai pada tahun 2020, salah satunya berkaitan dengan masalah pendidikan. Secara khusus, pendidikan tinggi (PT) berada di inti strategi ini: universitas memainkan peran kunci dalam memastikan bahwa Eropa menjadi 'ekonomi yang cerdas,</p>
--	--	--	--

			berkelanjutan, dan inklusif.
<p>Implementasi Ensiklik Laudato Si Dalam Kebijakan Pastoral Paroki Sebagai Usaha Meningkatkan Kesadaran Ekologis Umat Di Paroki St. Yosef Pekerja Wairpelit Keuskupan Maumere</p>	<p>Astina Vebriani Pasaribu</p>	<p>2024</p>	<p>Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan implementasi Ensiklik Laudato Si dalam kebijakan pastoral paroki sebagai usaha meningkatkan kesadaran ekologis umat di Paroki St. Yosef Pekerja Wairpelit Keuskupan Maumere. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif. Objek yang diteliti adalah makna dan pesan-pesan nilai ekologis dari ensiklik Laudato Si serta peningkatan kesadaran ekologis dari umat paroki St. Yosef Pekerja Wairpelit Keuskupan Maumere. Sumber data utama karya ilmiah ini adalah ensiklik Laudato Si, dan karya Edwind Satri, “Keadilan Ekologi Antargenerasi (Suatu Refleksi Kritis Teologis dalam Terang Laudato Si.” Sumber data sekunder diperoleh melalui beberapa kajian terdahulu tentang tanggung jawab ekologi. Teknik pengumpulan data yang dipakai oleh penulis adalah studi literatur, wawancara, dan fokus grup diskusi. Wawancara dan fokus grup diskusi dilakukan</p>

			<p>sesuai konteks umat setempat dan berdasarkan kenyataan tentang penghayatan hidup mereka dalam hubungannya dengan lingkungan. Berdasarkan hasil penelitian, disimpulkan bahwa, implementasi Ensiklik Laudato Si dalam kebijakan pastoral Paroki St. Yosef Pekerja Wairpelit Keuskupun Maumere dapat meningkatkan kesadaran umat untuk merawat bumi sebagai rumah bersama. Dengan adanya seruan Paus Fransiskus dalam Ensiklik Laudato Si, umat semakin menyadari bahwa, pertama, tanggung jawab merawat bumi adalah tanggung jawab bersama. Kedua, gerakan bersama untuk menanam 'satu rumah satu pohon,' gerakan pemeliharaan tanaman, penyediaan tempat sampah dan aksi Jumat bersih sungguh disadari sebagai tindakan praktis untuk menyelamatkan wajah bumi yang terluka. Ketiga, umat menyadari bahwa manusia adalah bagian dari alam, dan bukan sebaliknya alam adalah bagian dari manusia. Perubahan kesadaran seperti ini hanya mungkin melalui pertobatan</p>
--	--	--	--

			<p>ekologis. Keempat, semua bentuk kesadaran ini lahir dari spiritualitas ekologis sebagai dasar untuk berpartisipasi merawat alam, dan juga sebagai kekuatan untuk berjalan bersama alam menuju Allah sebagai pencipta langit dan bumi serta segala isinya.</p>
--	--	--	--

Sumber: Peneliti 2026

Penelitian pertama adalah artikel berjudul “**Russia-Ukraine War: A Constructivist Analysis**” yang ditulis oleh **Muhammad Monaqib Hayat** dan diterbitkan pada tahun 2022. Penelitian ini berupaya menganalisis perang Rusia-Ukraina melalui lensa konstruktivisme sosial. Dengan menyoroti identitas, norma, dan kepentingan yang saling bertentangan di antara aktor yang terlibat dalam konflik, studi yang dilakukan berargumen bahwa isu politik dikonstruksi menjadi isu keamanan oleh manajer strategis Rusia. Berdasarkan argumen inti ini, penelitian ini membahas dua bidang utama: peran identitas yang bertentangan antara aktor dalam memperburuk konflik dan persepsi antar manajer strategis Rusia. Sejalan dengan pandangan ini, penelitian ini fokus pada budaya strategis Rusia untuk menjelaskan keterikatan manajer strategis Rusia terhadap penyebab konflik sejak awal. Untuk mendemonstrasikan hal ini, metode kualitatif digunakan guna mengembangkan pemahaman komprehensif tentang konflik tersebut. Penelitian ini menyimpulkan bahwa celah antara Ukraina dan Rusia berakar dalam sejarah dan identitas kolektif mereka yang telah berkembang menjadi perang total dan hanya bisa diselesaikan jika semua pihak mengadopsi pendekatan keamanan yang objektif.

Berdasarkan hal tersebut, perbedaan penelitian terdahulu ini dengan penelitian penulis adalah penelitian penulis akan lebih spesifik dalam menganalisis Peran Gereja Katolik dalam Mempromosikan Norma Lingkungan yang Diusung oleh Ensiklik Laudato Si’ di Lingkup Keuskupan Agung Makassar dan Tantangan yang Dihadapi oleh Keuskupan Agung Makassar dalam Mengimplementasikan Norma-Norma Lingkungan dari Ensiklik Laudato Si’ di Tingkat Komunitas Lokal Khususnya di Kevikepan Makassar. Sementara penelitian **Muhammad Monaqib Hayat** lebih

umum dan berfokus dalam melihat fenomena perang rusia-ukraina melalui pisau analisis konstruktivisme. Artinya, kedua penelitian ini sama-sama menggunakan konstruktivisme sebagai pisau analisis tetapi mempunyai objek penelitian yang berbeda dan metode penelitian yang berbeda pula.

Penelitian kedua adalah artikel berjudul **“The EU as a Norm Entrepreneur in Education Policy: An Analysis of the Diffusion of European Ideas and Policies”** yang ditulis oleh Tonia Bieber yang diterbitkan pada tahun 2016. Penelitian ini berfokus pada Peran Uni Eropa sebagai Norm Entrepreneur khususnya berkaitan dengan kebijakan di bidang pendidikan. Penelitian ini mengeksplorasi bagaimana Uni Eropa turut mempengaruhi negara-negara anggotanya untuk mengadopsi berbagai kebijakan yang disepakati di tataran regional khususnya berkaitan dengan berbagai kebijakan di bidang pendidikan.

Beranjak dari hal tersebut, terdapat perbedaan yang cukup signifikan antara penelitian terdahulu ini dengan penelitian yang sedang dikerjakan oleh penulis. Dapat dilihat bahwa penelitian yang dikaji penulis lebih dalam menganalisis bagaimana peran gereja katolik sebagai norm entrepreneur yang berusaha menawarkan gagasan soal isu kesadaran lingkungan dan pertobatan ekologis kepada masyarakat, berbeda dengan penelitian sebelumnya yang lebih berfokus pada pengaruh Uni Eropa sebagai Norm Entrepreneur dalam mengartikulasikan dan menyebarkan Norma baru khususnya terkait kebijakan Pendidikan di tataran regional.

Penelitian ketiga ini berjudul **“Implementasi Ensiklik Laudato Si Dalam Kebijakan Pastoral Paroki Sebagai Usaha Meningkatkan Kesadaran Ekologis Umat Di Paroki St. Yosef Pekerja Wairpelit Keuskupan Maumere”** yang ditulis oleh **Astina Vebriani Pasaribu** pada tahun 2024. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan implementasi Ensiklik Laudato Si dalam kebijakan pastoral paroki sebagai usaha meningkatkan kesadaran ekologis umat di Paroki St. Yosef Pekerja Wairpelit Keuskupan Maumere. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif. Objek yang diteliti adalah makna dan pesan-pesan nilai ekologis dari ensiklik Laudato Si serta peningkatan kesadaran ekologis dari umat paroki St. Yosef Pekerja Wairpelit Keuskupan Maumere.

Teknik pengumpulan data yang dipakai oleh penulis adalah studi literatur, wawancara, dan fokus grup diskusi. Wawancara dan fokus grup diskusi dilakukan

sesuai konteks umat setempat dan berdasarkan kenyataan tentang penghayatan hidup mereka dalam hubungannya dengan lingkungan. Berdasarkan hasil penelitian, disimpulkan bahwa, implementasi Ensiklik Laudato Si dalam kebijakan pastoral Paroki St. Yosef Pekerja Wairpelit Keuskupan Maumere dapat meningkatkan kesadaran umat untuk merawat bumi sebagai rumah bersama. Dengan adanya seruan Paus Fransiskus dalam Ensiklik Laudato Si, umat semakin menyadari bahwa, pertama, tanggung jawab merawat bumi adalah tanggung jawab bersama. Kedua, gerakan bersama untuk menanam 'satu rumah satu pohon,' gerakan pemeliharaan tanaman, penyediaan tempat sampah dan aksi Jumat bersih sungguh disadari sebagai tindakan praktis untuk menyelamatkan wajah bumi yang terluka. Ketiga, umat menyadari bahwa manusia adalah bagian dari alam, dan bukan sebaliknya alam adalah bagian dari manusia. Perubahan kesadaran seperti ini hanya mungkin melalui pertobatan ekologis. Keempat, semua bentuk kesadaran ini lahir dari spiritualitas ekologis sebagai dasar untuk berpartisipasi merawat alam, dan juga sebagai kekuatan untuk berjalan bersama alam menuju Allah sebagai pencipta langit dan bumi serta segala isinya.

Tentunya terdapat berbagai perbedaan signifikan antara penelitian terdahulu ini dan penelitian yang digarap oleh penulis. Beberapa di antaranya seperti fokus utama antara penelitian dari Astina Vebriani Pasaribu ini dengan penelitian penulis cukup berbeda, di mana penulis lebih memperluas cakupan penelitian dalam konteks umat katolik di keuskupan agung makassar sedangkan penelitian terdahulu berfokus pada penerapan ensiklik laudato si' di paroki st. Yosef wairpelit Keuskupan Maumere. Teknik pengumpulan data yang digunakan pun berbeda yakni Teknik pengumpulan data yang dipakai oleh penelitian terdahulu adalah studi literatur, wawancara, dan fokus grup diskusi. Sedangkan, penulis menggunakan metode studi literatur dan wawancara mendalam.

Dengan demikian, perbedaan utama antara penelitian yang dikaji penulis dan penelitian-penelitian terdahulu ini adalah fokus yang lebih spesifik pada Peran Gereja Katolik dalam Mempromosikan Norma Lingkungan yang Diusung oleh Ensiklik Laudato Si' di Lingkup Keuskupan Agung Makassar dan Tantangan yang Dihadapi oleh Keuskupan Agung Makassar dalam Mengimplementasikan Norma-Norma Lingkungan dari Ensiklik Laudato Si' di Tingkat Komunitas Lokal Khususnya di Kevikepan Makassar.

